

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Chosun Ilbo dan Kyunghyang Shinmun membentuk pola agenda setting dan framing yang berbeda secara konsisten dalam meliput isu pelepasan treated wastewater Fukushima. Dari sisi agenda setting, kedua media menunjukkan pola frekuensi dan prominensi pemberitaan yang berbeda dengan Kyunghyang Shinmun memusatkan perhatian pada tahap awal ketidakpastian sebelum pelepasan dilakukan dan memberikan alokasi ruang yang lebih luas pada tiap artikelnya, sementara Chosun Ilbo baru mencapai puncak pemberitaannya ketika legitimasi ilmiah dari IAEA telah tersedia. Dari sisi framing, Chosun Ilbo secara konsisten membingkai isu ini melalui pendekatan yang berorientasi pada legitimasi kebijakan pemerintah dan verifikasi ilmiah, sementara Kyunghyang Shinmun secara konsisten menekankan akuntabilitas pemerintah dan perlindungan kepentingan publik. Kedua elemen ini berhasil ditunjukkan secara meyakinkan melalui analisis tekstual terhadap tiga puluh satu artikel yang menjadi unit analisis penelitian.

Namun demikian, argumen yang dikemukakan Naveh (2002) mengenai *foreign policy decision-making environment* pada dasarnya lebih kompleks daripada sekadar terbentuknya perbedaan *agenda setting* dan *framing* di tingkat teks media. Naveh menjelaskan bahwa media membentuk lingkungan tempat kebijakan luar negeri dirumuskan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana atau melalui indikator apa lingkungan tersebut dapat dikenali secara empiris setelah terbentuk. Penelitian ini berusaha menutup celah tersebut melalui dua jalur bukti tambahan. Pertama, wawancara dengan salah satu jurnalis Kyunghyang Shinmun, Park Yong-ha yang menunjukkan bahwa tujuan pemberitaan mengenai Fukushima dipahami secara internal bukan untuk mengubah kebijakan pemerintah secara langsung, melainkan untuk membentuk opini publik yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan tekanan terhadap pemerintah. Kedua, penelitian ini menelusuri jejak diskursus publik secara langsung pada platform yang dapat diakses secara terbuka untuk

memverifikasi apakah mekanisme tersebut benar-benar termanifestasi dalam bentuk respons konkret di ruang publik.

Penelusuran pada kedua jalur tidak menemukan jejak diskursus publik yang cukup kuat dan dapat diverifikasi secara langsung terhubung dengan momen-momen krusial yang dianalisis. Hal ini merupakan sebuah keterbatasan yang lebih tepat dipahami sebagai akibat aksesibilitas data mengingat ekosistem diskursus publik domestik Korea Selatan secara khas terkonsentrasi pada platform berbahasa Korea yang secara struktural sulit dijangkau peneliti asing, ketimbang sebagai bukti bahwa diskursus tersebut tidak pernah terbentuk. Dengan demikian, pernyataan Park Yong-ha mengenai mekanisme pembentukan opini publik perlu dipahami sebagai gambaran niat institusional dari satu narasumber yang memperoleh dukungan tidak langsung dari data survei mengenai tingkat kekhawatiran publik pada periode yang sama, namun belum dapat dijustifikasi secara penuh sebagai bukti empiris yang konkret dalam penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa klaim media sebagai variabel yang membentuk *foreign policy decision-making environment* hanya dapat dijustifikasi pada level pembentukan agenda dan framing di ruang teks media, namun tidak dapat dijustifikasi secara penuh hingga pada level termanifestasinya lingkungan tersebut dalam bentuk diskursus publik yang konkret dan dapat diobservasi. Penelitian ini menunjukkan secara empiris bagaimana dua media dengan orientasi ideologis berbeda membangun agenda dan framing yang berbeda atas isu kebijakan luar negeri yang sama. Kemudian penelitian ini mengidentifikasi bahwa kerangka Naveh (2002) memiliki keterbatasan konseptual dalam menjelaskan indikator operasional bagi terbentuknya lingkungan diskursif dan mengusulkan opini publik sebagai salah satu indikator yang potensial namun belum sepenuhnya dapat diverifikasi dalam batasan data penelitian ini. Penelitian ini tidak bermaksud menyimpulkan adanya hubungan kausal antara pemberitaan media, opini publik, dan kebijakan pemerintah, mengingat keterbatasan data yang tersedia. Kontribusinya terletak pada penjelasan bahwa media berperan sebagai salah satu unsur yang berupaya membangun lingkungan diskursif melalui agenda setting, framing, dan upaya pembentukan

opini publik, sekalipun keberhasilan upaya tersebut hingga pada level respons publik yang konkret masih memerlukan verifikasi lebih lanjut pada penelitian mendatang yang memiliki akses lebih luas terhadap ekosistem diskursus domestik Korea Selatan.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami peran media *sebagai foreign policy decision-making environment* secara lebih komprehensif. Penelitian ini hanya berfokus pada dua surat kabar nasional Korea Selatan, yaitu Chosun Ilbo dan Kyunghyang Shinmun sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan lanskap media Korea Selatan yang juga mencakup media penyiaran, media digital, maupun platform media sosial. Padahal perkembangan media digital telah memperluas proses pembentukan agenda dan *framing* melalui berbagai aktor komunikasi di luar media arus utama. Kemudian penelitian ini menganalisis lingkungan pembentuk kebijakan luar negeri melalui pemberitaan media dan didukung oleh wawancara dengan seorang jurnalis Kyunghyang Shinmun. Keterbatasan akses terhadap narasumber dari Chosun Ilbo serta tidak adanya wawancara dengan pembuat kebijakan menyebabkan penelitian ini belum dapat menjelaskan secara langsung bagaimana lingkungan diskursif yang dibentuk media diterima, dipertimbangkan, atau direspons dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, konsep *foreign policy decision-making environment* yang dikemukakan oleh Naveh (2002) tidak menyediakan definisi maupun indikator operasional yang jelas mengenai apa yang dimaksud sebagai "diskursus" dalam pembentukan lingkungan tersebut. Ketidadaan operasionalisasi ini menyebabkan peneliti harus menentukan sendiri parameter dan bentuk diskursus yang perlu diverifikasi keberadaannya dan dalam penelitian ini diinterpretasikan sebagai respons aktor domestik yang terekam dalam jejak reaksi publik pada platform-platform yang dapat diakses. Namun, interpretasi ini bersifat spesifik terhadap konteks penelitian ini dan belum tentu berlaku secara umum, sehingga subteori mengenai diskursus dalam kerangka Naveh (2002) perlu

dipandang sebagai bagian yang masih lemah secara konseptual dan memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk dapat digunakan secara konsisten dalam menentukan diskursus apa yang perlu dijustifikasi keberadaannya pada penelitian-penelitian berikutnya.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai hubungan antara media dan kebijakan luar negeri secara lebih komprehensif melalui tiga arah pengembangan berikut. Pertama dari sisi verifikasi diskursus, penelitian lanjutan perlu menjangkau platform diskusi berbahasa Korea seperti TheQoo, DC Inside, atau Naver Café yang idealnya dapat dicapai melalui kolaborasi dengan penutur asli bahasa Korea atau peneliti domestik untuk memverifikasi secara langsung apakah framing yang dibangun Chosun Ilbo dan Kyunghyang Shinmun benar-benar termanifestasi dalam respons masyarakat Korea Selatan pada tiap momen krusial. Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dijangkau dalam penelitian ini akibat keterbatasan bahasa dan aksesibilitas platform.

Kedua dari sisi cakupan objek penelitian, kajian mendatang dapat memperluas jumlah dan jenis media yang dianalisis dan tidak terbatas pada dua media cetak daring dengan orientasi ideologis konservatif dan progresif, tetapi turut melibatkan media penyiaran seperti KBS dan MBC yang secara struktural memiliki keterkaitan dengan pemerintah melalui mekanisme pengangkatan pimpinan, sehingga dapat diuji apakah pola framing berbeda secara signifikan antara media yang memiliki kedekatan struktural dengan negara dan media yang sepenuhnya independen secara kepemilikan sebagaimana kedua media dalam penelitian ini.

Ketiga dari sisi triangulasi metode, penelitian lanjutan sangat disarankan mengombinasikan analisis media dengan wawancara terhadap aktor pengambil kebijakan secara langsung seperti staff Kementerian Luar Negeri untuk memverifikasi apakah dan sejauh mana narasi yang dibangun media benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan aktual, mengingat penelitian ini hanya mampu menunjukkan pembentukan lingkungan diskursif pada level teks media dan belum mampu menjustifikasi bagaimana atau apakah lingkungan tersebut benar-benar dipersepsikan oleh aktor kebijakan sebagaimana

diasumsikan dalam kerangka Naveh (2002). Pendekatan semacam ini akan memungkinkan pengujian yang lebih langsung terhadap validitas *foreign policy decision-making environment* sebagai konsep yang menjembatani produksi wacana media dengan proses pengambilan kebijakan luar negeri yang sesungguhnya.

Keempat dari sisi pengembangan operasionalisasi *agenda setting*, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan teori atau pendekatan yang mampu mengukur *salience* secara lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, *salience* diidentifikasi melalui indikator tekstual dasar berupa panjang artikel dan dukungan audiovisual dalam bentuk foto. Padahal penonjolan suatu isu juga dapat tercermin dari dimensi leksikal dan semantik, seperti pemilihan diksi, frekuensi kemunculan kata atau frasa tertentu, serta penekanan makna yang secara konsisten digunakan media dalam mengonstruksi suatu isu. Dengan begitu penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan pengukuran *salience* yang lebih kuat sehingga proses pembentukan agenda media dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan tidak terbatas pada karakteristik teks pemberitaan semata.

6.2.2 Saran Praktis

Melihat dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya peran media massa dalam membentuk lingkungan diskursif yang mengiringi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, media diharapkan terus mengedepankan prinsip jurnalisme yang akurat, transparan, dan berbasis bukti ketika memberitakan isu-isu kebijakan luar negeri yang memiliki dimensi ilmiah dan teknis yang kompleks, seperti pembuangan *treated wastewater* Fukushima. Penyajian informasi yang didukung oleh data ilmiah yang kredibel, disertai keberagaman sumber dan perspektif, dapat membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tanpa mengurangi fungsi media sebagai ruang untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Di tengah lingkungan media yang semakin terpolarisasi, upaya menghadirkan pemberitaan yang tetap berpegang pada standar profesional juga menjadi penting agar perbedaan sudut pandang tidak berkembang menjadi penyebaran informasi yang menyesatkan ataupun mempersempit ruang diskusi publik.

Mengenai saran praktis bagi pemerintah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan isu kebijakan luar negeri yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi informasi, menyampaikan dasar ilmiah yang mendukung setiap kebijakan secara konsisten, serta membangun komunikasi risiko yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh publik. Pelibatan pakar independen, lembaga ilmiah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyampaian informasi juga dapat membantu meningkatkan kredibilitas komunikasi pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil.